

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan atas urain hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan pada bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Latar belakang terjadinya konflik berdarah perebutan wilayah yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan disebabkan karena pemindahan Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan dari Banggai ke Salakan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemindahan Ibukota Kabupaten menimbulkan reaksi dari masyarakat dikarenakan masyarakat tidak mau menerima pemindahan Ibukota Kabupaten melihat kondisi yang ada maka pemerintah melakukan penyegelan-penyegelan kantor-kantor yang ada di Banggai. Tetapi polisi mencoba menghalangi masyarakat dan membuka penyegelan kantor-kantor yang di segel oleh masyarakat dan mengakibatkan kemarahan rakyat akibatnya terjadi pertikain antara masyarakat Banggai dengan aparat kepolisian yang menimbulkan 4 orang tewas tertembak serta 16 orang lainnya terluka.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi konflik berdarah perebutan wilayah di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terdapat ketentuan yang multi tafsir dari substansi Undang-undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten

Banggai Kepulauan yang dipicu oleh Pasal 10 ayat (3) dan pasal 11 sehingga Undang-undang tersebut tidak dapat memberikan kepastian hukum terhadap status dan kedudukan letak Ibukota Kabupaten Banggai Kepulauan.

3. Dampak dari konflik berdarah perebutan wilayah adalah dampak ekonomi, sosial dan kemanan yang di rasakan rakyat Banggai.

5. 2 Saran

Berdasarkan dari temuan atau Kesimpulan hasil penelitian di atas maka dapat disarankan sebagai solusi dari permasalahan, sebagai berikut :

1. Hendaknya pemerintah harus tegas dalam mengambil keputusan sehingga pertikain di Kabupaten Banggai Kepulauan tidak terulang lagi. Dan meberikan solusi yang terbaik sehingga dapat membahagiakan kedua belah pihak antara masyarakat Banggai dan Salakan.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten mengajukan masalah Kasus yang terjadi di Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Pemerintah Pusat agar dibuat suatu peraturan mengenai UU agar konflik yang terjadi dikabupaten Banggai Kepulauan maupun daerah lain tidak terulang lagi.
3. Diharapkan dalam pemekaran Kabupaten Banggai Laut sesuai harapan masyarakat, pemerintah yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan dan Kabupaten Banggai Laut.